BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/225 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/29 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan produk hukum daerah khususnya Peraturan Bupati dengan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terbaru maka Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.1.3/107 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.1.3/107 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/29 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026.

Pasal I

Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.1.3/107 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3/29 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026 pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Maret 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:
1. Inspektur Daerah; dan
2. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/225 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3/2026 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

No	Tentang	materi pokok	Perangkat Daerah
1.	Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Strategi pengendalian, dan membentuk satuan tugas pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Inspektorat Daerah
2.	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kbaupaten Karanganyar	pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah sebagai bagian dari pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah	Inspektorat Daerah
3.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara	Perubahan pada jabatan yang wajib menyampaikan LHKPN Mengatur penyampaian Laporan Harta bagi ASN yang tidak wajib LHKPN	Inspektorat Daerah
4.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar	Penyesuaian Pedoman Pengelolaan Aduan dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar	Penegasan Status Operasional dan Pembiayaan LPPL Swiba	Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar	Acuan atau pedoman dalam penanganan Pengaduan Masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika

7.	Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026-2030	Pengesahan dokumen arah kebijakan terkait dengan strategi sanitasi di Daerah	Bapperida
8.	Review Dokumen Jakstrada SPAM Tahun 2023-2027	Review dokumen kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Daerah	Bapperida
9.	Penyusunan Dokumen RADPG Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal Tahun 2026-2030	Pengesahan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi berbasis potensi sumber daya lokal di Daerah	Bapperida
10.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah	Merubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru	Bapperida
11.	Perubahan RKPD 2026	Perubahan rencana kerja pemerintah Daerah Tahun 2026	Bapperida
12.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Dokumen RKPD untuk Tahun 2027	Bapperida
13.	Perubahan Renja 2026	Perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2026	Bapperida
14.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	Dokumen Renja untuk tahun 2027	Bapperida
15.	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah	Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Bapperida
16.	Standar Harga Tahun Anggaran 2027	Memuat SSH, SBU, ASB dan HSPK Tahun 2026	Badan Keuangan Daerah
17.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Harga 2026	Perubahan SSH, SBU, HSPK dan ASB 2026	Badan Keuangan Daerah
18.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2026	Badan Keuangan Daerah
19.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2026	Badan Keuangan Daerah
20.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Standar Harga 2026	Perubahan SSH, SBU, HSPK dan ASB 2026	Badan Keuangan Daerah
21.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan Daerah

22.	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan Daerah
23.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Keuangan Daerah
24.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah
25.	Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah. (Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah)	Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
26.	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. (Mencabut Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah)	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
27.	Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah)	Perubahan Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan Daerah
28.	Ketentuan Umum Pajak Daerah	Mencabut Perbup Nomor 73 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah

29.	Pemberian Insentif Pemugutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)	Perubahan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Keuangan Daerah
30.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	Pedoman pemberian meliputi pembayaran dan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas	Badan Keuangan Daerah
31.	Penanaman Modal	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal	DPMPTSP
32.	Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	DPMPTSP
33.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Merupaka delegasi penyusunan peraturan bupati oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan	DPMPTSP
34.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Merubah ketentuan SOP pada DPMPTSP	DPMPTSP
35.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas	Penambahan ayat pada Bab IV Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Biaya BBM untuk Sekretaris Daerah dapat diberikan maksimal 2 (dua) kendaraan dinas	Bagian Umum Setda
36.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Diskuktrans ESDM
37.	Pedoman Pengadaan Guru Pengganti di Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Pengaturan mengenai pengadaan Guru Pengganti non-ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

38.	Program Arsip Vital	Mengatur tentang identifikasi arsip vital, penataan, perlindungan dan pengamanan arsip vital, penyelamatan dan pemulihan arsip vital, akses dan layanan arsip vital	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
39.	Sistem Kearsipan Daerah	Aplikasi kearsipan Dinamis dan Simpul jaringan SIKN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
40.	Organisasi Kearsipan	Kedudukan dan Tugas Fungsi Lembaga Kearsioan Daerah, Unit Kearsipan, dan Unit Pengolah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
41.	Perpustakaan Umum Kabupaten Karanganyar	Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi pengurusan, perancanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar memenuhi standar nasional perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
42.	Perubahan Tarif Retribusi Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Perubahan sub komponen dalam Perda PDRD	Dinas Kesehatan
43.	Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di UPT Puskesmas	Dinas Kesehatan
44.	Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian PegawaiBadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Mengatur tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
45.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat	Penambahan pengaturan tentang remunerasi bagi PPPK Paruh Waktu	Dinas Kesehatan
46.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar	Perubahan aturan tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Kartini

47.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah	Merubah ketentuan terkait penyesuaian administrasi dan penggunaan logo RSUD Kartini	RSUD Kartini
48.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Perubahan aturan tentang Pelaksanaan Kerjasama di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	RSUD Kartini
49.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar	Perubahan aturan Pola Tata Kelola BLUD RSUD disesuaikan dengan kondisi di Rumah Sakit	RSUD Kartini
50.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 tentang Remunerasi BLUD RSUD	Perubahan aturan tentang Remunerasi yang diterapkan di BLUD RSUD	RSUD Kartini
51.	Pengelolaan Barang BLUD RSUD	Aturan tentang pengelolaan barang yang bersumber dari anggaran BLUD RSUD	RSUD Kartini
52.	Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD	Aturan terkait pelaksanaan anggaran di BLUD RSUD	RSUD Kartini
53.	Investasi BLUD RSUD	Aturan tentang Investasi di BLUD RSUD	RSUD Kartini
54.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Menambahkan ketentuan tentang penetapan tarif layanan sementara	RSUD Kartini
55.	Perubahan Tarif Retribusi Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Penambahan detail rincian objek retribusi yang belum masuk dalam Perda PDRD	RSUD Kartini
56.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non-ASN pada BLUD RSUD	Perubahan pengaturan terkait pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD RSUD	RSUD Kartini
57.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD	Perubahan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa di BLUD RSUD	RSUD Kartini

58.	Utang dan Piutang BLUD RSUD	Pengaturan mengenai utang dan piutang di BLUD RSUD	RSUD Kartini
59.	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	a. Maksud dan Tujuan b. Sasaran c. Organisasi Pelaksanaan d. Mekanisme Penyelenggaraan e. Pelaporan f. Monitoring dan Evaluasi g. Pendanaan h. Ketentuan Lain-Lain i. Penutup	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
60.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Karanganyar Tahun 2026-2046	Pengaturan mengenai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan penataan ruang, pengaturan zonasi dan kelembagaan pengawasan pola ruang di kawasan perkotaan Karanganyar	DPUPR
61.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Colomadu Tahun 2026-2046	Pengaturan mengenai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan penataan ruang, pengaturan zonasi dan kelembagaan pengawasan pola ruang di Kecamatan Colomadu	DPUPR
62.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026-2046	Pengaturan mengenai rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan penataan ruang, pengaturan zonasi dan kelembagaan pengawasan pola ruang di Kecamatan Tawangmangu	DPUPR
63.	Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Dalam Rangka Pemberdayaan Karang Taruna di Kbaupaten Karanganyar	a. Tujuan dan Sasaran b. Persyaratan administratif c. Besaran d. Pelaksanaan e. Monitoring dan Evaluasi	Dinas Sosial
64.	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Penilaian ASN berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022	BKPSDM
65.	Aparatur Sipil Negara *Corporate University*	Penyelenggaraan ASN Corpu, Manajemen pengetahuan, teknologi pembelajaran, dan forum pembelajaran	BKPSDM
66.	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

67.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
68.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
69.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Utaian Tugas Jabatan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas pada Dinas dan Badan Daerah	Mengubah Uraian Tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Bagian Organisasi Setda
70.	Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Kebutuhan jabatan atau formasi dari jumlah dan jenisnya	Bagian Organisasi Setda
71.	Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar	Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada RSUD Kartini	Bagian Organisasi Setda
72.	Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bagian Organisasi Setda
73.	Penetapan Kelas Jabatan	Penyesuaian Kelas Jabatan berdasarkan persetujuan kelas jabatan dari Menteri PANRB	Bagian Organisasi Setda
74.	Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana	Penyusunan standar kompetensi jabatan pelaksana	Bagian Organisasi Setda
75.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
76.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda
77.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah	a. Kedudukan b. Susunan Organisasi c. Tugas dan Fungsi d. Kepegawaian e. Tata Kerja	Bagian Organisasi Setda

78.	Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasil pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Bagian Organisasi Setda
79.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	a. pembentukan; b. kedudukan; c. susunan organisasi; d. tugas dan fungsi e. tata kerja; dan f. uraian tugas.	Bagian Organisasi Setda
80.	Standar Pelayanan Minimal Desa	Menetapkan Standar Operasional Pelayanan di Desa	Dispermades
81.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Jenawi	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Jenawi	Dispermades
82.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Tawangmangu	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Tawangmangu	Dispermades
83.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Jatiyoso	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Jatiyoso	Dispermades
84.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Jatipuro	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Jatipuro	Dispermades
85.	Penetapan Batas Desa Kecamatan Ngargoyoso	Menetapkan dan menegaskan batas desa di Kecamatan Ngargoyoso	Dispermades
86.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Merubah ketentuan mengenai pakaian dinas perangkat desa	Dispermades
87.	Tata Naskah Dinas di Desa	Menetapkan tata naskah dinas di Lingkungan pemerintah desa	Dispermades
88.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	a. Ketentuan pemberian honor/penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa (PPKD, PKPKD, THR) b. Penambahan tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan c. Penghapusan ketentuan tentang penghasilan perangkat desa yang berstatus PNS	Dispermades

89.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok	Mengubah ketentuan tentang pemanfaatan hasil pengelolaan tanah bengkok dan ketentuan peralihan	Dispermades
90.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Mengubah ketentuan penatausahaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan bagaimana penggunaan dana bantuan keudangan kepada Pemerintah Desa	Dispermades
91.	Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa	Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga di Desa	Dispermades
92.	Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2026	Petunjuk teknis dan kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026	Dispermades
93.	Perubahan Perbup Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Perubahan ketentuan dalam Lampiran menyesuaikan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Dispermades
94.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Desa	Perubahan ketentuan tentang penentuan alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa	Dispermades
95.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	SatpolPP
96.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah	Perubahan beberapa pasal terkait syarat dan tata cara pemberian insentif	Bagian Kesra Setda
97.	Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	a. Pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak	Bagian Pemerintahan Setda

		diperoleh setiap warga negara secara minimal. b. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.	
98.	Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan	Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan	Bagian Hukum Setda
99.	Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Menambahkan ketentuan mengenai pedoman pengelolaah JDIH Sekretariat DPRD	Bagian Hukum Setda

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO